

## Evaluasi Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah di Banjarmasin Timur Terhadap Akreditasi Nasional

Raihanatul Jannah<sup>1</sup>, Khairunnisa Khairunnisa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia, Email: [raihanah69@gmail.com](mailto:raihanah69@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia, Email: [annisa@uin-antasari.ac.id](mailto:annisa@uin-antasari.ac.id)

**Abstract:** Pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan harus mencakup semua dimensi pendidikan, baik itu aspek proses pembelajaran maupun hasil yang dicapai. Penelitian ini mengkaji kesiapan dan kebutuhan madrasah ibtidaiyah di Banjarmasin dalam melaksanakan proses akreditasi yang sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan. Studi ini menawarkan strategi praktis bagi madrasah untuk meningkatkan kesiapan akreditasi melalui pendekatan berbasis pendanaan lokal dan pelatihan guru. Menggunakan metode penelitian deskriptif-eksploratif dan purposive sampling, data dikumpulkan dari enam madrasah ibtidaiyah Kota Banjarmasin melalui angket, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini menemukan tingkat kesiapan madrasah secara keseluruhan mencapai 86,96%. Standar pembiayaan dan standar penilaian menunjukkan kesiapan tertinggi dengan masing-masing persentase 83,33%. Namun, terdapat tantangan signifikan pada standar sarana dan prasarana, di mana 50% responden menyatakan ketidaksiapan terkait luas lahan, fasilitas laboratorium, dan ruang perpustakaan. Selain itu, 16,67% responden menyatakan ketidaksepadanan latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang disampaikan, dan hanya 33,33% yang sepenuhnya siap dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek (PjBL), dan pembelajaran kontekstual. Madrasah hendaknya menetapkan tindakan strategis, seperti pengalokasian dana, peningkatan fasilitas, dan pelatihan tenaga pendidik, untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mendukung keberhasilan akreditasi madrasah.

**Keywords:** akreditasi, kesiapan, Madrasah Ibtidaiyah, standar nasional pendidikan, peningkatan mutu

DOI: [10.58577/dimar.v6i2.334](https://doi.org/10.58577/dimar.v6i2.334)

 OPEN ACCESS

DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam

Open access under [Creative Commons Attribution 4.0 International Licence](#).

(CC-BY) 

## PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan instrumen efektif untuk memastikan mutu pendidikan. Proses ini berfungsi sebagai tolok ukur kualitas, menegaskan bahwa institusi atau lembaga yang terakreditasi telah menjalani evaluasi eksternal secara teliti berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, serta memenuhi kriteria minimum yang ditentukan.<sup>1</sup> Selain itu, akreditasi adalah proses yang terus berlangsung, mencakup evaluasi diri, refleksi, dan upaya peningkatan<sup>2</sup> dan penetapan peringkat.<sup>3</sup> Menurut Astenia dkk., akreditasi juga diakui sebagai status yang diberikan melalui penilaian kualitas dengan memenuhi standar tertentu demi mendukung peningkatan mutu pendidikan.<sup>4</sup> Dengan demikian, akreditasi adalah proses penting untuk menjamin kualitas pendidikan, menandai mutu institusi, dan mendorong perbaikan berkelanjutan sesuai standar serta harapan masyarakat.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Tahun 2003, akreditasi bertujuan menilai kelayakan sekolah/madrasah dan memberikan pengakuan peringkat mutu. Akreditasi berperan meningkatkan kualitas pendidikan<sup>5</sup>, memberikan gambaran kinerja sebagai dasar pembinaan, serta menentukan kelayakan pelayanan pendidikan. Selain itu, akreditasi mendukung perencanaan bantuan, pembinaan madrasah, dan mempermudah perpindahan siswa antarjenjang, sekaligus memetakan mutu guna meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>6</sup> Akreditasi madrasah ibtidaiyah oleh BAN-S/M berfungsi sebagai pengendali mutu, jaminan kualitas, dan pendorong peningkatan mutu. Proses ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan madrasah untuk pengembangan berkelanjutan (*Quality Control*), memberikan kepastian mutu kepada masyarakat (*Quality Assurance*), serta mendorong perbaikan dan penyempurnaan berbagai aspek pengelolaan pendidikan (*Quality improvement*).

Manajemen mutu terpadu bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dengan fokus bertahap pada setiap komponen.<sup>7</sup> Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu yang melibatkan berbagai faksi untuk meningkatkan intelektual umat manusia, sesuai amanat UUD 1945, melalui implemtasi sistem penjaminan

<sup>1</sup> Pradeep Kumar, Balvinder Shukla, dan Don Passey, "Impact of Accreditation on Quality and Excellence of Higher Education Institutions," *Investigacion Operacional* 41 (Maret 2021): 151-67.

<sup>2</sup> Ali Imron, *Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah* (Malang: Jurusan AP FIP Universitas Negeri Malang, 2012).

<sup>3</sup> Tumpal Siahaan, Paningkat Siburian, dan Din Sihotang, "School Accreditation In Disruption Era In Improving Quality Of Education (Case Study in Junior High School at Pematangsiantar)," dalam *Proceedings of the Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia* (Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia, Medan, Indonesia: EAI, 2020), <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2019.2296613>.

<sup>4</sup> Dewi Astenia, Neti Karnati, dan Rugaiyah, *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH ATAU MADRASAH* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020).

<sup>5</sup> Arif Rahman Hakim dan Nugraha Suharto, "The Role of Accreditation in Improving Education Quality," *Atlantis Press* 258 (2018), <http://dx.doi.org/10.2991/icream-18.2019.61>.

<sup>6</sup> Suharsono, Fajar Purwaningsih, dan Wildan Sirojuddin, "Akreditasi Sekolah Atau Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam," *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 14, no. 1 (1 Juli 2024): 22-37, <https://doi.org/10.69879/xjf81h91>.

<sup>7</sup> Finy Muslihatuzzahro, "INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) IN THE CONTEXT OF EDUCATION," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 8, no. 02 (26 Juli 2023): 50-56, <https://doi.org/10.54892/jmpialidah.v8i02.260>.

mutu pendidikan (SPMP). Mutu pendidikan dicapai melalui kolaborasi sinergis antara pihak internal dan eksternal.<sup>8</sup>

Mutu pendidikan yang baik berpengaruh langsung pada kapasitas sumber daya manusia.<sup>9</sup> Layanan pendidikan yang bermutu di madrasah menjadi harapan utama seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan.<sup>10</sup> Sallis, sebagaimana dikutip oleh Setianingsih, mutu adalah kemampuan untuk memenuhi dan bahkan melampaui harapan serta kebutuhan pelanggan.<sup>11</sup> Di Indonesia, kualitas pendidikan tercermin melalui mekanisme seperti akreditasi, sertifikasi, dan penjaminan mutu. Akreditasi, yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan menilai kelayakan agenda atau lembaga pendidikan. Selain meningkatkan kapasitas pendidikan, akreditasi juga berfungsi sebagai jaminan publik, memastikan keberadaan sekolah berkualitas yang dapat dikenali melalui status akreditasinya.

Akreditasi sekolah berfungsi sebagai alat pengendalian diri yang membantu madrasah untuk menyadari dan memahami kekuatan serta kelemahannya. Proses akreditasi ini menjadi sarana bagi sekolah untuk terus berupaya meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan yang ada.<sup>12</sup> Sekolah harus mampu meyakinkan bahwa mereka telah memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mewujudkan prosedur pendidikan yang berbobot, sehingga menghasilkan output yang mumpuni.

Pengawasan dan evaluasi lembaga pendidikan mencakup aspek pembelajaran dan hasil lulusan, untuk membentuk karakter dan kompetenmengingat peran vital lembaga tersebut dalam membentuk karakter dan kompetensi. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2018, menetapkan BAN-S/M dan BAN-PNF sebagai otoritas pelaksanaan akreditasi, yang kemudian diubah menjadi BAN PAUD, Disdas, dan Dikmen pada tahun 2023, sebagai bagian dari strategi untuk menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.<sup>13</sup>

Di Banjarmasin, terdapat sekitar 62 madrasah ibtidaiyah yang berkesempatan melaksanakan akreditasi. Akreditasi harus memperhatikan beberapa komponen seperti standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Madrasah ibtidaiyah yang ingin mendapatkan penilaian komprehensif harus memperhatikan hal ini dan memerlukan pendampingan untuk memperoleh pengakuan dan peringkat kelayakan

---

<sup>8</sup> M. Zulkifli, "Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal At'dib*, 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/235744-kinerja-badan-akreditasi-provinsi-sekola-acc2ba22.pdf>.

<sup>9</sup> Lukman Abdul Majid, "Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Santri Di Pondok Pesantren Darus Sa'adah Lampung Tengah," *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (19 Desember 2023): 44-54, <https://doi.org/10.58577/dimar.v5i1.103>.

<sup>10</sup> Dlamini Cyprian et al., "Competence-Based Education Pedagogy and Its Infusion into Primary School Learning Activities: Experiences from Teachers in A Selected Cluster in Eswatini," *Journal of Educational Research and Practice* 3, no. 1 (January 9, 2025): 1-15, <https://doi.org/10.70376/jerp.v3i1.267>.

<sup>11</sup> Charisma Dewi Setianingsih, "Status Akreditasi Dan Kualitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri," *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan Universitas Negeri Malang* 1 (2017): 138.

<sup>12</sup> Asep Suryana, "Akreditasi, Sertifikasi Dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan," t.t., [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_ADMINISTRASI\\_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP\\_SURYANA/AKREDITASI\\_dan\\_SERTIFIKASI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/AKREDITASI_dan_SERTIFIKASI.pdf).

<sup>13</sup> Eneng Muslihah dkk., "AKREDITASI SEBAGAI UPAYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH (PENELITIAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG)," *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 1 (3 September 2024): 132-50, <https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15486>.

dari pemerintah. Banyak madrasah bergelut dalam tantangan kekurangan fasilitas,<sup>14</sup> kesulitan pendanaan,<sup>15</sup> serta jumlah tenaga administrasi yang minim dan kesulitan mengelola dokumen akreditasi<sup>16</sup> yang berdampak pada pemenuhan SNP. Berdasarkan observasi awal, madrasah ibtidaiyah di Banjarmasin Timur menghadapi tantangan dalam mempersiapkan akreditasi, seperti keterbatasan SDM, sarana, dan akses informasi, yang menyebabkan ketidaksiapan dalam memenuhi standar pendidikan. Hal ini dapat memengaruhi mutu layanan dan peringkat akreditasi madrasah.

Antonius mengkaji pelaksanaan akreditasi di sekolah dasar dengan merujuk pada prinsip dan standar akreditasi,<sup>17</sup> sementara Novidayanti dkk. menyoroti dampak akreditasi terhadap penambahan mutu pendidikan di sekolah dasar, yang berpusat pada aktivitas lembaga yang fokus pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan.<sup>18</sup> Akreditasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Pelaksanaannya memerlukan perhatian pada manajemen akreditasi, identifikasi hambatan beserta solusinya, tindak lanjut pasca-akreditasi, serta langkah-langkah untuk mencapai hasil optimal.<sup>19</sup> Penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada aspek tertentu, seperti pelaksanaan dan dampak akreditasi, tanpa mengkaji kebutuhan madrasah secara komprehensif berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Selain itu, penelitian tersebut hanya berfokus pada satu lembaga pendidikan, sementara penelitian ini mengeksplorasi konteks lokal madrasah di Banjarmasin Timur, di mana tantangan geografis menjadi faktor yang memengaruhi kesiapan madrasah.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkap kebutuhan madrasah di Banjarmasin Timur berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Penelitian ini penting karena memberikan informasi untuk membantu madrasah mempersiapkan diri dan memenuhi persyaratan akreditasi. Hasil akreditasi menjadi indikator mutu dan acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta merencanakan pengembangan madrasah. Studi tentang identifikasi kebutuhan madrasah ibtidaiyah dalam menghadapi akreditasi sangat penting, dan rekomendasi praktis yang dihasilkan dapat menjadi model strategis untuk daerah lain. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesiapan dan kebutuhan madrasah ibtidaiyah di Banjarmasin dalam menghadapi proses akreditasi sesuai delapan standar pendidikan.

---

<sup>14</sup> Miftahul Ulum, "Kebijakan Standar Nasional Pendidikan," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, no. 1 (28 Maret 2020): 105–16, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>.

<sup>15</sup> Suharsono, Purwaningsih, dan Sirojuddin, "Akreditasi Sekolah Atau Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam," 1 Juli 2024.

<sup>16</sup> Yazid Al Basthomi, Asep Sunandar, dan Agus Timan, "PENGELOLAAN PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH DI MADRASAH ALIYAH," *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (4 Juni 2024): 393–402, <https://doi.org/10.26418/jvip.v16i2.73277>.

<sup>17</sup> Antonius, "Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri," *Fokus* 12, no. 2 (2014): 250–58.

<sup>18</sup> Novidayanti M dkk., "Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar," *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 6, no. 4 (8 Juli 2024): 3260–65, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6964>.

<sup>19</sup> Afridoni Afridoni dkk., "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (3 Juli 2022): 13832–38, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4402>.

## METODE PENELITIAN

Studi ini berada dalam kelompok penelitian deskriptif eksploratif, yaitu model penelitian survey yang berupaya menguraikan tanda, kejadian, atau kasus yang berlangsung. Madrasah yang menjadi subjek penelitian adalah madrasah di Kecamatan Banjarmasin Timur yang menjalin kerja sama dengan UIN Antasari Banjarmasin, yaitu MIN 4 Banjarmasin, MI Khadijah, MI Taman Pemuda Islam (TPI) Keramat, MI Sullamut Taufiq, MI Al-Muhajirin, dan MI Darul Istiqamah.

Data utama yang digali pada kajian ini, antara lain: 1) kesiapan madrasah ibtidaiyah di kota Banjarmasin dalam melaksanakan akreditasi madrasah, dan 2) kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah di kota Banjarmasin terkait pelaksanaan akreditasi. Data tersebut digali melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen angket ini mencakup butir-butir dari komponen standar nasional pendidikan, yaitu: (a) komponen standar isi; (b) komponen standar proses; (c) komponen standar kompetensi lulusan; (d) komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan; (e) komponen standar sarana dan prasarana; (f) komponen standar pengelolaan; dan (g) komponen standar penilaian. Penyusunan item pernyataan divalidasi melalui kriteria *validitas isi*. Skala dalam instrumen ini antara lain 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = setuju, dan 4 = sangat setuju. Sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam terkait upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan akreditasi.

Setelah data dihimpun, analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif atau teknik persentase. Data dari seluruh pernyataan pada angket dianalisis berdasarkan frekuensi, persentase, dan rata-rata, yang kemudian diklasifikasikan sesuai kategori yang relevan. Pada riset ini, skor tertinggi setiap pernyataan adalah 4, total pernyataan angket sebanyak 70, dan respondennya berjumlah 6. Sehingga, skor kriterium riset ini adalah  $4 \times 70 \times 6 = 1680$ . Acuan penafsiran data dengan memperhitungkan hasil prosentase terbanyak sebagai potret kebutuhan yang diperlukan oleh madrasah ibtidaiyah dalam menyelenggarakan akreditasi madrasah dan gambaran umum kesiapan madrasah. Wawancara dianalisis dengan coding manual dan dipergunakan untuk menguraikan hasil deskriptif statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesiapan MI dalam Menghadapi Akreditasi

#### a. Tahap persiapan akreditasi

Keberhasilan akreditasi sangat bergantung pada perencanaan yang matang oleh pihak madrasah. Salah satu langkah penting adalah membentuk tim khusus akreditasi yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen serta kebutuhan lain yang terkait dengan delapan standar nasional pendidikan (SNP). Sebelum proses akreditasi dimulai, enam madrasah yang menjadi responden telah mengadakan rapat terbuka dengan seluruh dewan guru dan staf untuk membentuk tim khusus tersebut, yang berperan dalam mengelola data, dokumen, dan informasi yang diperlukan sesuai dengan komponen SNP yang ditetapkan.

Selain pengumpulan bukti fisik, sekolah juga mengalokasikan dana khusus untuk pelaksanaan akreditasi yang besaran dananya berbeda-beda. Anggaran dana tersebut tergantung kondisi setiap madrasah.



Gambar 1. Dana Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Keberhasilan akreditasi sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang matang dari pihak madrasah. Proses persiapan ini biasanya memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan untuk memastikan terpenuhinya sarana, prasarana, dan perangkat akreditasi yang dibutuhkan. Salah satu langkah penting dalam memaksimalkan persiapan adalah membentuk tim khusus akreditasi yang bertugas melengkapi semua komponen yang diperlukan sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan (SNP). SNP sendiri merupakan tolok ukur minimum dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, yang meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Dalam pemenuhannya sendiri, semua madrasah mengaku sudah menyiapkan segala hal terkait dengan kelengkapan 8 SNP secara tahap demi tahap baik pada kelengkapan administrasi maupun pada standar sarana dan prasarananya. Hal tersebut terjadi karena dalam penyediaan bukti fisik tidak semua pemenuhannya dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak madrasah.

Secara individual rata-rata 5 dari 6 kepala madrasah menyatakan bahwa bukti fisik yang paling sulit untuk dipenuhi pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah bukti fisik pada standar sarana dan prasarana. Hal tersebut disebabkan karena 2 faktor. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana memiliki kriteria/syarat tertentu seperti harus ada luas area sesuai dengan ketentuan/ukuran, harus memiliki bangunan sekolah tersendiri bukan milik orang lain, ruang TU, UKS, Musholla, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dianggap sulit dalam hal pemenuhannya.

Kedua, tidak tersedia dana yang cukup dalam pelaksanaan akreditasi tersebut. Ketersediaan dana merupakan faktor penting bagi setiap madrasah saat melaksanakan akreditasi. Dengan dana yang cukup pihak madrasah dapat menyiapkan apa yang masih kurang pada sekolah yang dikelolanya. Namun besarnya dana yang diperlukan sekolah/madrasah dalam memenuhi kelengkapan akreditasi menjadi kendala yang besar karena anggaran yang terbatas, sehingga penyediaan bukti-bukti fisik dalam pelaksanaan akreditasi berjalan apa adanya sesuai dengan kesanggupan oleh masing-masing madrasah.

Selain hal di atas, untuk mempersiapkan diri, pihak madrasah menyatakan bahwa madrasah telah mempersiapkan instrument dan petunjuk teknis (juknis) akreditasi jauh

sebelum pelaksanaan akreditasi dimulai, walaupun penyediaanya tidak secara keseluruhan, seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah MI Khadijah “Perangkat ini (instrumen akreditasi dan petunjuk teknis akreditasi) sudah kami persiapkan karena tahun yang akan datang ini kami mau akreditasi lagi, cuma masih belum sempurna, belum 100 %.”

Setiap tahapan akreditasi memerlukan dukungan dana, yang digunakan untuk melengkapi dan memperbaiki kekurangan dalam pemenuhan dokumen pendukung sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, sumber pendanaan madrasah untuk akreditasi berasal dari APBN atau kontribusi pihak komite sekolah. Namun, tidak semua madrasah menerima dana akreditasi dari APBN, sehingga sebagian besar pendanaan harus diupayakan secara mandiri oleh madrasah. Bahkan, dana yang diperoleh dari APBN sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama proses akreditasi.

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan akreditasi bervariasi antara satu madrasah dengan yang lain, tergantung pada kondisi dan fasilitas yang dimiliki masing-masing. Madrasah dengan kondisi dan fasilitas yang kurang memadai memerlukan anggaran yang lebih tinggi daripada madrasah yang sudah tersedia sarana yang lebih baik.

#### b. Tahap Pelaksanaan Akreditasi

Semua madrasah telah memahami prosedur pelaksanaan akreditasi karena sebelumnya telah beberapa kali melaksanakan proses tersebut. Saat visitasi data, pihak sekolah sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, semua madrasah selalu mempersiapkan lokasi untuk pelaksanaan pertemuan awal dan akhir bersama tim asesor.

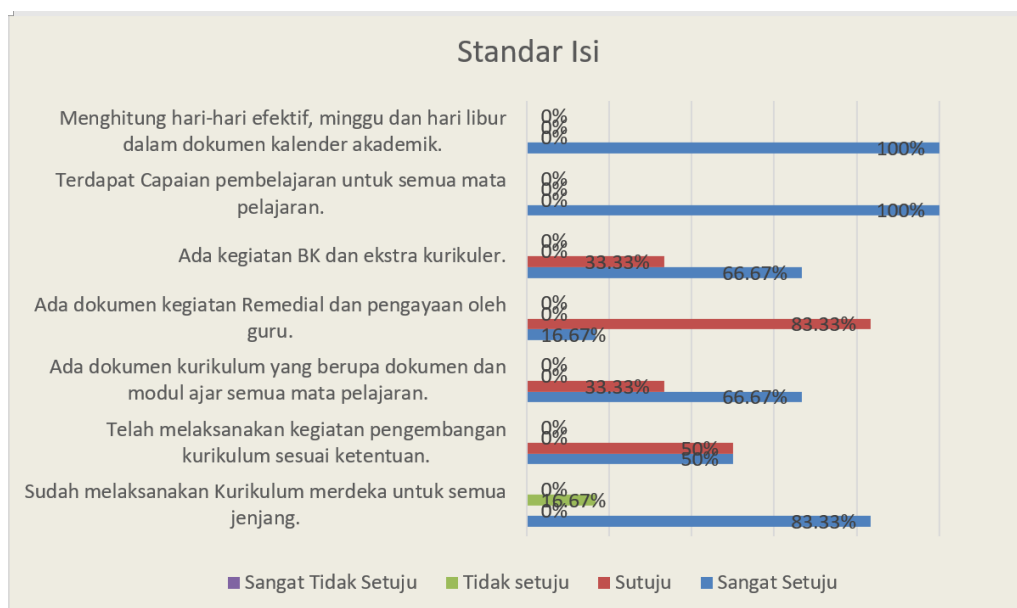
Pada pertemuan awal, madrasah mengadakan acara sederhana berupa ramah tamah dengan tim asesor, disertai sesi perkenalan antara kedua belah pihak. Setelah proses klarifikasi, verifikasi, dan validasi selesai, madrasah dan tim asesor melanjutkan ke pertemuan akhir di lokasi yang telah disiapkan oleh madrasah. Pertemuan ini diakhiri dengan penyampaian saran perbaikan dan pembenahan oleh pihak madrasah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sekolah MI Al-Muhajirin berikut:

*“Pada pertemuan akhir setelah akreditasi, kami meminta masukan dari asesor mengenai kekurangan yang ada, sehingga dapat kami perbaiki di masa mendatang”*

Berdasarkan angket yang disebarakan mengenai kesiapan madrasah ibtidaiyah dalam menghadapi akreditasi, diperoleh hasil sebagai berikut.

##### 1) Standar isi

Kesiapan sekolah dalam menghadapi akreditasi dari aspek standar isi mencakup berbagai hal, seperti kurikulum yang tepat, pengembangan kurikulum sesuai ketentuan, serta dokumentasi yang lengkap, seperti dokumen kurikulum, modul ajar, kegiatan remedial dan pengayaan, bimbingan konseling, ekstrakurikuler, capaian pembelajaran, serta perhitungan hari efektif dan kalender akademik.



**Gambar 2.** Kesiapan Sekolah pada Standar Isi

Gambar dua menunjukkan bahwa penerapan kurikulum pada semua jenjang kelas mendapat tanggapan "sangat setuju" dari 83,33% sumber data, sedangkan 16,67% menyatakan "tidak setuju." Seluruh sekolah telah melaksanakan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan, dengan 50% responden memilih "sangat setuju" dan 50% "setuju." Sekolah juga memiliki dokumen kurikulum berupa dokumen I dan modul ajar, dengan 66,67% responden mengatakan "sangat setuju" dan 33,33% "setuju."

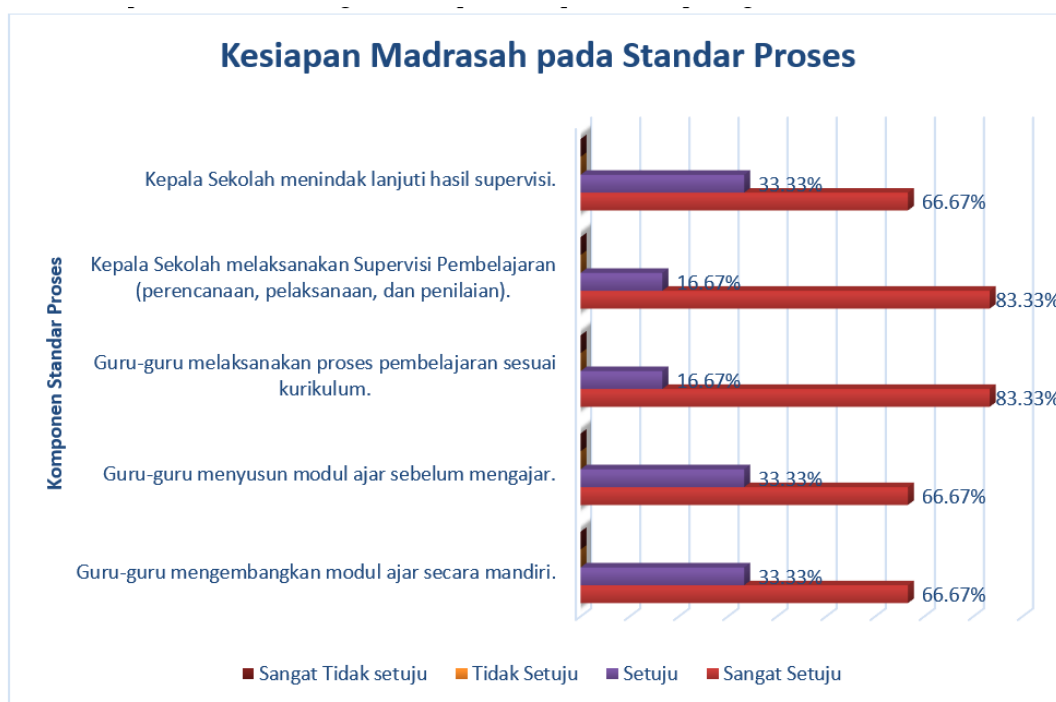
Untuk ketersediaan dokumen kegiatan remedial dan pengayaan oleh guru, 16,67% respon untuk "sangat setuju," sementara 83,33% menjawab "setuju." Pada kegiatan bimbingan konseling (BK) dan ekstrakurikuler, 66,67% respon untuk pilihan "sangat setuju," dan 33,33% respon untuk kategori "setuju." Sementara itu, pada dua item terakhir dalam standar isi, yaitu ketersediaan capaian pembelajaran dan perhitungan hari dan minggu efektif, serta hari libur yang tertuang dalam kalender akademik, seluruh responden menyatakan "sangat setuju."

## 2) Standar proses

Kesiapan sekolah dari segi standar proses dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3 berikut menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam mengembangkan modul ajar secara mandiri dan menyusun modul ajar sebelum mengajar mendapat tanggapan "sangat setuju" dari 66,67% respon dan "setuju" dari 33,33% respon. Untuk pernyataan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran sesuai kurikulum, persentase tanggapan "sangat setuju" lebih tinggi, mencapai 83,33%.

Selain itu, kepala sekolah dinilai melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembelajaran dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh 83,33% responden yang menyatakan "sangat setuju." Namun, tindak lanjut terhadap supervisi tersebut memiliki persentase tanggapan yang lebih rendah, dengan 66,67% respon menyatakan "sangat setuju" dan 33,33% menyatakan "setuju."



Gambar 3. Kesiapan madrasah pada Standar proses

### 3) Standar kompetensi lulusan

Kesiapan sekolah dalam menyiapkan dokumen akreditasi meliputi Kriteria Ketuntasan minimal (KKM), pelibatan siswa dalam proses belajar, pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan Contextual Teaching and Learning, penggunaan media, proses pembelajaran habituasi, melatih siswa berfikir tingkat tinggi, inventif dan inovatif, pengalaman seni dan budaya, pengalaman berjiwa atau sikap sportif, dan pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara dituangkan dalam tabel berikut.

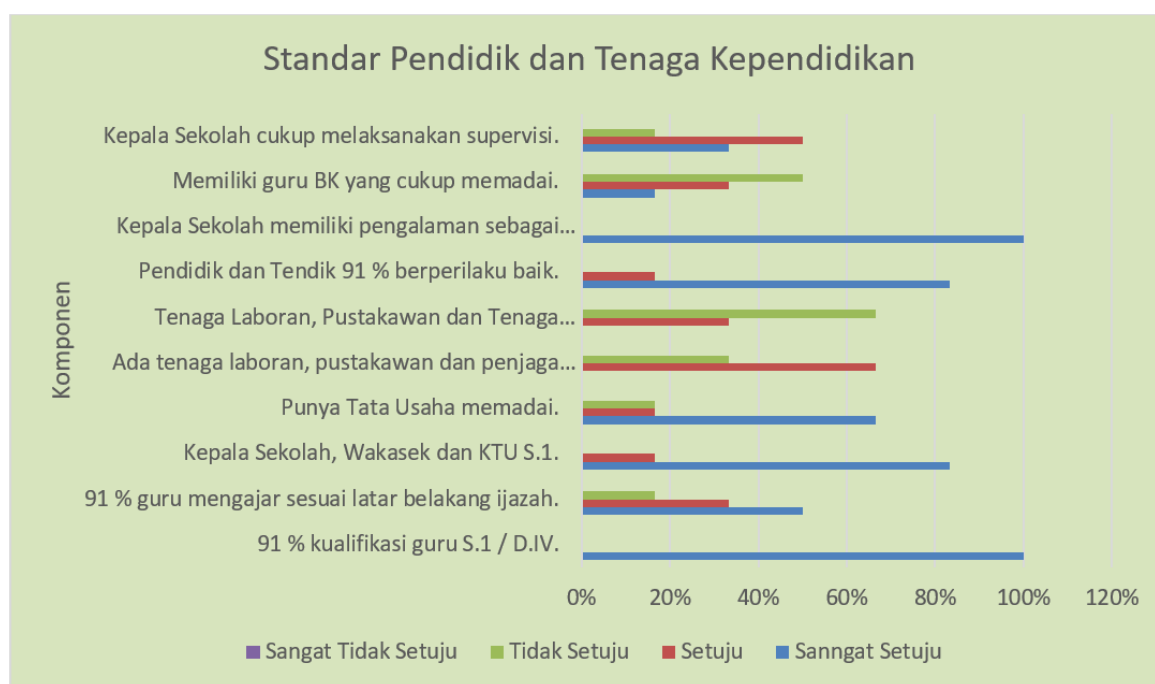
Tabel 1. Kesiapan Sekolah pada Standar Kompetensi Lulusan

No	Standar Kompetensi Lulusan	SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Terdapat dokumen Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Ilmu Pengetahuan Sosial, serta Seni dan Budaya..	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-
2	Pengajar memprioritaskan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran.	5	83.33	1	16.67	-	-	-	-
3	Guru melaksanakan proses pembelajaran PBL, PjBL, CTL.	-	-	5	83.33	1	16.67	-	-
4	Menggunakan media pembelajaran lingkungan.	1	16.67	5	83.33	-	-	-	-
5	Mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreatif, dan inovatif.	2	33.33	3	50	1	16.67	-	-

No	Standar Kompetensi Lulusan	SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
6	Terdapat proses pembelajaran pembiasaan.	3	50	3	50	-	-	-	-
7	Siswa memperoleh pengalaman di bidang seni dan budaya.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-
8	Siswa dibimbing untuk mengembangkan pengalaman dengan sikap sportif.	3	50	3	50	-	-	-	-
9	Siswa diberikan pengalaman dalam berinteraksi dan berperan dalam kehidupan sosial masyarakat dan kenegaraan.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-

Sebagian besar sekolah telah siap menghadapi akreditasi dalam aspek standar kompetensi lulusan. Meskipun, 16,67% responden menyatakan tidak setuju pada poin mengenai pelaksanaan proses pembelajaran berbasis PBL, PjBL, dan CTL, serta keterampilan guru dalam membimbing siswa untuk mengembangkan pemikiran yang kritis, kreatif, dan inovatif.

#### 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan



**Gambar 4.** Kesiapan Sekolah untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kesiapan madrasah dalam pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan terlihat dari terpenuhinya kualifikasi guru dengan jenjang pendidikan S1 atau D4 (100%). Namun, terdapat 16,67% ketidaksepadanan antara pendidikan akhir guru dengan mata pelajaran yang disampaikan. Ketersediaan tenaga kependidikan yang kompeten atau ahli di bidangnya mendapat persentase tertinggi pada tanggapan "tidak setuju," yaitu sebesar 66,67%. Sementara itu, keberadaan guru BK terbagi rata dengan 50% menunjukkan respon "setuju" dan 50% yang "tidak setuju." Detail kesiapan madrasah dalam aspek ini tertuang pada gambar 4.

### 5) Standar sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan standar yang paling sulit dipenuhi oleh sekolah. Hal ini tercermin dari hasil persentase angket yang tinggi pada tanggapan "tidak setuju". Sebanyak 50% responden menyatakan "tidak setuju" terhadap luas lahan yang sesuai ketentuan, sementara untuk ketersediaan ruang laboratorium, perpustakaan, dan keterampilan, 33,33% menjawab "tidak setuju", dan 50% sisanya memilih "sangat tidak setuju". Pada poin "Terdapat ruang BK, OSIS, PMR/UKS," tanggapan "tidak setuju" mencapai 83,33%, menjadikannya persentase tertinggi. Adapun ketersediaan mushalla dan fasilitas olahraga masing-masing memperoleh 16,67% tanggapan "tidak setuju".

**Tabel 2.** Kesiapan Sekolah pada Standar Sarana dan Prasarana

No	Standar Sarana dan Prasarana	SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Memiliki luas area sekolah sesuai ketentuan.	-	-	3	50	3	50	-	-
2	Memiliki gedung sekolah sendiri.	5	83.33	1	16.67	-	-	-	-
3	Tersedia ruang Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan ruang Tata Usaha.	5	83.33	1	16.67	-	-	-	-
4	Sarana / prasarana belajar yang cukup.	1	16.67	4	66.67	1	16.67	-	-
5	Memiliki ruang laboratorium, ruang Perpustakaan dan ruang Keterampilan.	-	-	1	16.67	2	33.33	3	50
6	Tersedia ruang untuk bimbingan konseling, OSIS, serta PMR/UKS.	-	-	1	16.67	5	83.33	-	-
7	Terdapat ruang guru.	3	50	3	50	-	-	-	-
8	Terdapat Musholla.	2	33.33	3	50	1	16.67	-	-
9	Terdapat fasilitas olah raga (alat dan lapangan).	-	-	5	83.33	1	16.67	-	-

### 6) Standar pengelolaan

Berbeda dari standar sebelumnya, standar pengelolaan menunjukkan tingkat kesiapan yang baik. Seluruh item pertanyaan atau pernyataan memperoleh tanggapan "sangat setuju" atau "setuju." Namun, pada poin mengenai keberadaan dokumen pembinaan siswa dan dokumen pengelolaan pegawai, masih terdapat 16,67% responden, atau satu sekolah, yang menyatakan "tidak setuju." Detail dipaparkan pada Tabel 3.

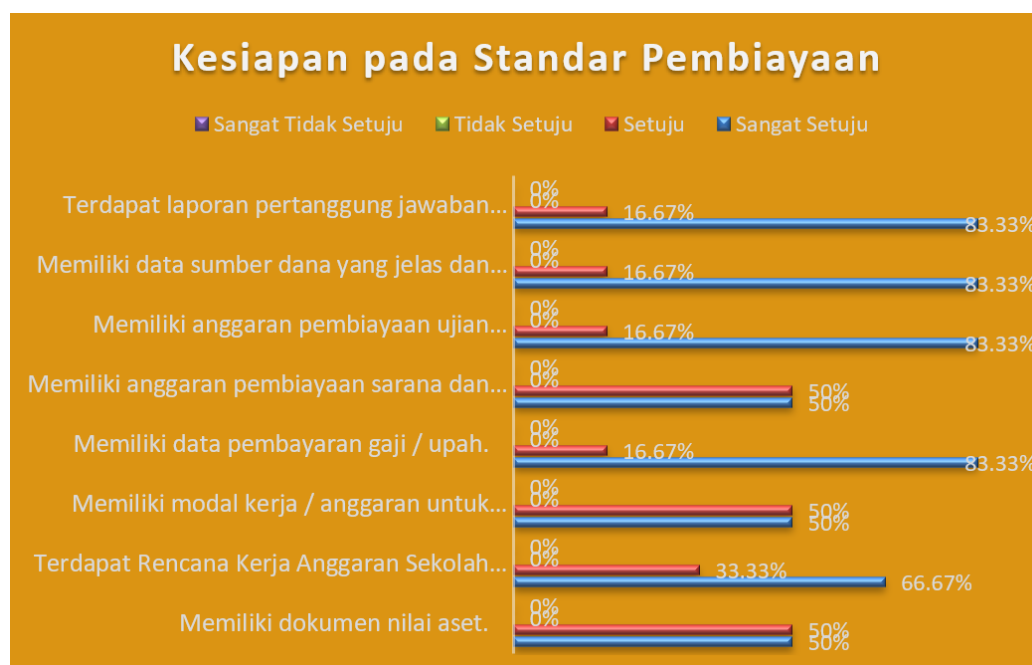
**Tabel 3.** Kesiapan Sekolah pada Standar Pengelolaan

No	Standar Pengelolaan	SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Sekolah memiliki naskah visi-misi sekolah.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-
2	Menyusun program kerja jangka menengah (4 tahun) serta program kerja tahunan.	3	50	3	50	-	-	-	-
3	Memiliki dokumen pengelolaan 8 Standar Nasional Pendidikan.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-
4	Memiliki susunan organisasi sekolah.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-

No	Standar Pengelolaan	SS		S		TS		STS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
5	Ada program penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.	2	33.33	4	66.67	-	-	-	-
6	Terdapat dokumen pengelolaan pembiayaan.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-
7	Ada dokumen pembinaan kesiswaan.	2	33.33	3	50	1	16.67	-	-
8	Terdapat dokumen pengelolaan fasilitas dan infrastruktur atau sarpras.	3	50	3	50	-	-	-	-
9	Terdapat regulasi untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan sekolah.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-
10	Ada dokumen pengelolaan pembelajaran.	4	66.67	2	33.33	-	-	-	-
11	Ada dokumen supervisi guru.	3	50	3	50	-	-	-	-
12	Ada dokumen pengelolaan pegawai	3	50	2	33.33	1	16.67	-	-

### 7) Standar pembiayaan

Standar pembiayaan menjadi aspek yang paling siap, sebagaimana terlihat dari hasil angket di mana seluruh madrasah menanggapi dengan "setuju" dan "sangat setuju." Sebanyak 83,33% responden menyatakan "sangat setuju" terhadap poin arsip pencatatan data penggajian, anggaran biaya operasional ujian semester, ujian akhir sekolah, dan ujian nasional, informasi sumber dana yang transparan dan tertata, serta laporan keuangan tahunan yang akuntabel. Untuk poin terkait keberadaan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), 66,67% responden menjawab "sangat setuju." Selain itu, 50% responden menyatakan "sangat setuju" terhadap pernyataan memiliki dokumen nilai aset, modal kerja atau anggaran pembiayaan sekolah, serta anggaran untuk pembiayaan sarana dan prasarana.

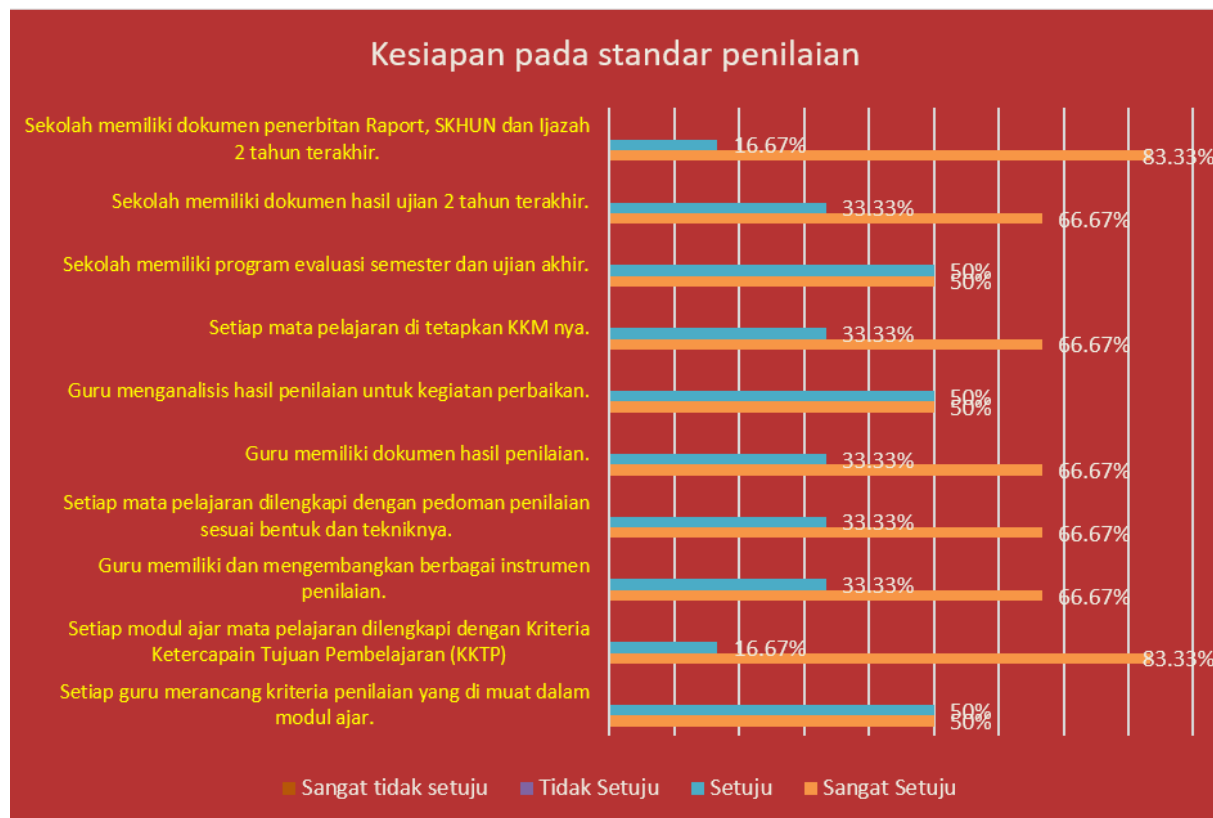


Gambar 5. Kesiapan Sekolah pada Standar Pembiayaan

### 8) Standar penilaian

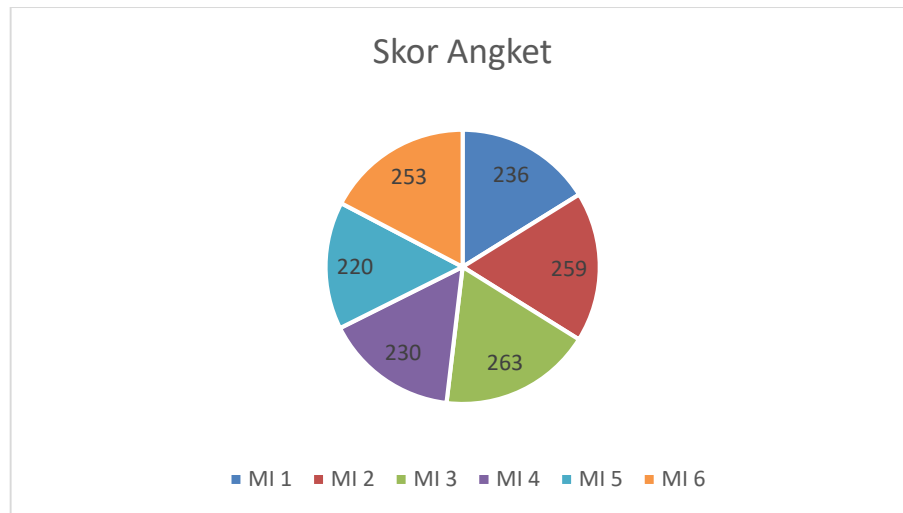
Sama halnya dengan standar pembiayaan, standar penilaian juga menjadi aspek yang paling siap bagi setiap madrasah dalam menghadapi akreditasi. Lihat tabel berikut.

Tabel 4. Kesiapan Sekolah pada Standar Penilaian



Persentase tertinggi untuk tanggapan "sangat setuju" sebesar 83,33% tercatat pada pernyataan bahwa setiap modul ajar mata pelajaran dilengkapi dengan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) serta sekolah memiliki dokumen penerbitan rapor, Surat Keterangan Hasil Ujian, dan ijazah dua tahun terakhir. Selanjutnya, 66,67% responden menyatakan "sangat setuju" untuk poin bahwa menyusun dan mengembangkan berbagai alat evaluasi, setiap mata pelajaran disertai panduan penilaian yang selaras dengan bentuk serta tekniknya, dan pendidik memiliki dokumen hasil evaluasi, setiap mata pelajaran memiliki KKM yang telah ditetapkan, serta sekolah memegang dokumen hasil ujian dua tahun terakhir. Sementara itu, pernyataan bahwa setiap guru mendesain kriteria penilaian yang dimuat dalam modul ajar, menelaah hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan, dan terdapat penetapan program evaluasi semester serta ujian akhir masing-masing memperoleh tanggapan "sangat setuju" sebesar 50%.

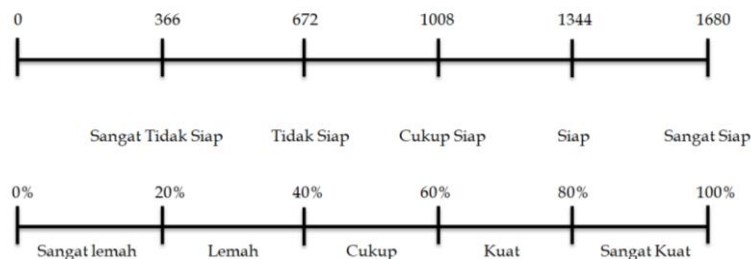
Total skor yang diperoleh dari responden dalam kesiapan sekolah dalam menghadapi akreditasi masuk sebesar 1461, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Skor maksimal = 1680

**Gambar 5.** Perolehan skor angket masing-masing madrasah

Jumlah skor yang diterima dari respon kepala madrasah adalah 1461. Dengan demikian, tingkat kesiapan madrasah dalam menghadapi akreditasi dihitung sebagai berikut:  $1461 : 1680 \times 100\% = 86,96\%$  dari kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan interpretasi, nilai 86,96% berada pada kategori sangat kuat, sedangkan skor 1461 masuk dalam kategori siap seperti yang ditunjukkan pada skema berikut.



**Gambar 5.** Skema kriterium angket

Peneliti berpendapat bahwa semua madrasah telah memahami prosedur pelaksanaan akreditasi sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, setiap madrasah sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan selama proses akreditasi, mulai dari visitasi oleh tim asesor, temu awal, hingga tahap klarifikasi, verifikasi, validasi data, dan temu akhir. Tingkat kesiapan ini juga didukung oleh pengalaman madrasah yang sebelumnya telah menjalani proses akreditasi.

Selama proses visitasi, langkah pertama yang dilakukan oleh madrasah adalah menyiapkan tempat kerja bagi tim asesor, baik untuk pertemuan awal maupun pertemuan akhir. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh madrasah selalu menyediakan fasilitas tersebut saat kedatangan tim asesor. Pada pertemuan awal, kegiatan diawali dengan acara ramah tamah atau seremonial sederhana, yang dilanjutkan dengan sesi perkenalan antara pihak sekolah dan tim asesor.

Selain itu, selama proses klarifikasi, verifikasi, dan validasi data, madrasah telah memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kelengkapan delapan Standar Nasional

Pendidikan (SNP). Langkah-langkah ini dirancang untuk memudahkan tim asesor dalam melaksanakan visitasi. Setelah tahapan klarifikasi, verifikasi, dan validasi selesai, madrasah bersama tim asesor mengadakan pertemuan akhir di lokasi yang telah disiapkan. Pertemuan tersebut biasanya ditutup dengan penyampaian saran dan rekomendasi terkait aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh madrasah.

#### c. Tahap Tindak Lanjut Akreditasi

Setelah kegiatan visitasi selesai, pihak madrasah menindaklanjuti temuan yang diperoleh dari visitasi tim asesor. Sebagai contoh, madrasah mengumpulkan berkas dan dokumen hasil visitasi. Berdasarkan wawancara, semua madrasah telah menyediakan tempat khusus untuk menyimpan berkas-berkas yang berkaitan dengan delapan Standar Nasional Pendidikan.<sup>20</sup>

Dalam tahapan ini, dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa apapun temuan dari hasil visitasi, setiap madrasah menjadikan hal tersebut sebagai bahan acuan untuk memperbaiki dan melengkapi hal-hal yang masing kurang di sekolah masing-masing.

MIN 4 Banjarmasin dan MI Sullamut Taufiq menyatakan bahwa waktu untuk menindaklanjuti hasil visitasi bergantung pada rekomendasi yang diberikan oleh tim asesor. MI TPI Keramat menjelaskan bahwa tidak ada batasan waktu tertentu; setelah akreditasi selesai, madrasah tinggal melakukan perbaikan. MI Darul Istiqomah mengatakan bahwa tindak lanjut biasanya dilakukan dalam jangka waktu lima tahun, mengingat hasil visitasi seperti refleksi yang dilakukan setiap lima tahun sekali.<sup>21</sup> MI Al-Muhajirin menyebutkan bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu sekitar 10-15 hari, sementara MI Khadijah menyebutkan antara 2-3 bulan, tergantung pada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

### **Kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah Terkait Pelaksanaan Akreditasi**

Pada akreditasi sebelumnya setiap sekolah sudah memenuhi kriteria yang baik, untuk melihat kebutuhan madrasah dalam persiapan akreditasi berikutnya dilakukan analisis terhadap tanggapan/ respon angket yang diberikan. Berdasarkan sajian data yang telah dipaparkan pada poin 1, peneliti mengidentifikasi kebutuhan madrasah dalam menghadapi akreditasi menjadi dua kriteria yaitu sekolah yang sudah terakreditasi A dan sekolah yang terakreditasi B.

#### a. Sekolah terakreditasi A

MI yang telah terakreditasi A perlu memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, terutama pada standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, keberadaan tenaga laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi yang sesuai dengan latar belakang keahlian pendidikan masih menjadi tantangan utama, sebagaimana dicatat oleh 91% responden. Selain itu, kepala sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan supervisi. Sementara itu, pada standar sarana dan prasarana, beberapa aspek yang perlu dipenuhi meliputi luas lahan yang sesuai ketentuan, ruang laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang BK, ruang OSIS, PMR/UKS, mushalla, serta fasilitas olahraga.

---

<sup>20</sup>Ada tempat khusus kami sediakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 8 standar pendidikan (Kepala Sekolah MI Khadijah)

<sup>21</sup>Yang jelas itu paling tidak 5 tahun ke depan, karena kan ini hasil visitasi, seperti reflika 5 tahun sekali, otomatis 5 tahun juga untuk menindak lanjutinya, apa yang kurang di adakan, apa yang tidak ada diusahakan semampunya. (Kepala MI Darul Istiqomah)

## b. Sekolah terakreditasi B

MI yang terakreditasi B perlu melakukan pembenahan pada beberapa standar, yaitu standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan. Pada standar kompetensi lulusan, fokus perbaikan meliputi penerapan metode pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan Contextual Teaching and Learning (CTL), serta pengembangan kegiatan yang menstimulus siswa untuk berpikir tingkat tinggi, inventif, dan inovatif. Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, upaya yang perlu diambil yaitu memastikan guru mengajar sesuai dengan bidang keahlian sesuai ijazah (91%), menyediakan tenaga administrasi yang memadai, serta memenuhi kebutuhan tenaga laboran, pustakawan, dan penjaga sekolah. Di samping itu, tenaga pendukung seperti laboran, pustakawan, dan administrasi juga harus memiliki keahlian yang relevan (91%), dan jumlah guru BK perlu ditingkatkan agar mencukupi kebutuhan.

Fasilitas dan infrastruktur yang perlu disiapkan meliputi luas lahan yang sesuai dengan aturan, sarana pembelajaran yang memadai, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, ruang BK, ruang OSIS, PMR/UKS, serta fasilitas olahraga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa fasilitas dan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama bagi pengelola pendidikan. Namun, keterbatasan ruang dan anggaran menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh sekolah atau madrasah untuk memenuhinya. Sementara itu, pada aspek pengelolaan, perlu adanya peningkatan dalam penyusunan dokumen pembinaan kesiswaan dan dokumen pengelolaan pegawai.

## Pembahasan

### a. Kesiapan Madrasah dalam Melaksanakan Akreditasi

Data skor keseluruhan responden pada angket terkait kesiapan akreditasi menunjukkan bahwa sebagian besar berada dalam kriteria siap, dengan persentase sebesar 86,96%. Persentase tersebut termasuk dalam kriteria yang sangat kuat, yang mengindikasikan bahwa setiap sekolah telah memiliki tingkat kesiapan yang baik untuk menghadapi akreditasi.

Kesiapan madrasah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan dimulai dengan rapat persiapan dan pembentukan tim kerja, yang menjadi bukti bahwa setiap sekolah telah menjalankan fungsi manajemen, khususnya dalam aspek pengorganisasian. Sejalan dengan pernyataan Kurniadin dan Machali, pengorganisasian adalah proses membentuk sistem dan menyusun anggota dalam suatu struktur untuk menggapai tujuan sekolah.<sup>22</sup> Pengorganisasian yang melibatkan partisipasi seluruh komponen sekolah menunjukkan bahwa madrasah memiliki sistem manajemen mutu yang dapat meningkatkan kualitas mutu.<sup>23</sup> Setelah dibentuk, tim akreditasi sekolah mempelajari juknis pelaksanaan, menyiapkan bukti fisik, dan kelengkapan komponen SNP secara bertahap mengacu pada berbagai regulasi.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> D. Kurniadin dan Machali, *Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012).

<sup>23</sup> Sumaryanti Sumaryanti dan Nurtanio Agus Purwanto, "Achieving the Quality of Education through the Application of Eight National Education Standards Using School-Based Management," *ALISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 1 (9 Januari 2023): 135–46, <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.1652>.

<sup>24</sup> Lia Harahap, Ibnu Hajar, dan Arif Rahman, "Analysis of Implementation of Standards for Facilities and Infrastructure of State Aliyah Madrasah in Medan City Based Minister of National Education Regulation Number

Berdasarkan wawancara dengan enam kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah, semua madrasah tersebut telah mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan tentang terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meskipun dilakukan secara gradual. Komponen yang paling menonjol terdapat pada standar proses, standar isi, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hanun, yang menunjukkan bahwa secara umum MI memiliki keunggulan pada standar isi dan standar proses.<sup>25</sup> Sekolah perlu mempertahankan serta meningkatkan kualitas pada standar-standar tersebut dengan memperkuat kemampuan guru dalam mengembangkan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM), modul ajar, serta sistem evaluasi yang mengikuti perkembangan teknologi, seni, dan budaya.<sup>26</sup> Proses pengelolaan kelas dilakukan melalui asesmen awal, penyusunan rencana, implementasi melalui pemahaman tujuan dan prinsip kurikulum mandiri, penentuan tujuan pembelajaran, penggunaan metode yang tepat, memfasilitasi siswa dalam membuat kelompok belajar, memberikan bantuan terkait konflik dan tantangan dalam pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.<sup>27</sup> Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, diharapkan mendukung kesiapan sekolah melalui kebijakan peningkatan biaya operasional madrasah, penguatan kompetensi guru dalam penerapan Kurikulum, serta peningkatan kapasitas pendidik dalam menyusun sistem penilaian dan evaluasi melalui pelatihan atau bimbingan teknis.

Madrasah diwajibkan melaksanakan mekanisme akreditasi yang bertujuan untuk memetakan kualitas pendidikan berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).<sup>28</sup> Kesiapan madrasah dalam menghadapi akreditasi juga tercermin dari pemahaman mereka terhadap mekanisme pelaksanaan akreditasi. Saat visitasi, sekolah telah menyiapkan ruangan khusus, dan pada tahap verifikasi, madrasah telah menyediakan bukti fisik yang diperlukan untuk melengkapi 8 Standar Nasional Pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses visitasi.

Penerapan *Total Quality Management (TQM)* di madrasah, khususnya di Banjarmasin Timur, menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Meskipun tingkat kesiapan akreditasi telah mencapai 86,96%, masih terdapat tantangan dalam hal fasilitas, infrastruktur, dan standar pendidik, yang menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan sesuai

---

of 2007,” dalam *Proceedings of the the 3rd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education, ACEIVE 2019, 16 November 2019, Universitas Negeri Medan, North Sumatra, Indonesia* (Proceedings of the the 3rd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education, ACEIVE 2019, 16 November 2019, Universitas Negeri Medan, North Sumatra, Indonesia, Medan, Indonesia: EAI, 2020), <https://doi.org/10.4108/eai.16-11-2019.2293262>.

<sup>25</sup> Farida Hanun, “Akreditasi Madrasah sebagai Kunci Keberhasilan dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP),” *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 13, no. 1 (2015).

<sup>26</sup> Helda Helda dan Syahrani Syahrani, “National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia,” *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 3, no. 2 (1 Maret 2022): 257–69, <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.32>.

<sup>27</sup> Ramdanil Mubarak, Makherus Sholeh, dan Ika Irayana, “Classroom Management Strategy in Implementing the Merdeka Curriculum (Independent Curriculum) in Primary Education Institutions,” *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 13, no. 2 (31 Desember 2023): 189–202, <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v13i2.11356>.

<sup>28</sup> Suharsono, Fajar Purwaningsih, dan Wildan Sirojuddin, “Akreditasi Sekolah Atau Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam,” *Educatia: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 14, no. 1 (1 Juli 2024): 22–37, <https://doi.org/10.69879/xjf81h91>.

dengan prinsip TQM. Salah satu aspek utama dalam TQM adalah budaya perbaikan berkelanjutan,<sup>29</sup> yang memungkinkan lembaga pendidikan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan melalui siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), mendorong evaluasi dan penyempurnaan sistematis dalam proses pendidikan.<sup>30</sup> Selain itu, keberhasilan implementasi TQM sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan,<sup>31</sup> termasuk guru, siswa, dan orang tua, yang berperan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih responsif serta mampu mengatasi berbagai tantangan mutu dengan lebih efektif.

#### b. Identifikasi Kebutuhan Madrasah Ibtidaiyah dalam Melaksanakan Akreditasi

Akreditasi sekolah adalah prosedur peninjauan yang dijalankan pemerintah atau lembaga independen yang memiliki otoritas untuk menetapkan tingkat kelayakan sebuah program atau madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Setiap sekolah atau madrasah wajib melaksanakan akreditasi sebagai dasar untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan setiap madrasah untuk melaksanakan akreditasi dapat berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh kepala madrasah, kebutuhan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

##### 1) Pengembangan pembelajaran berbasis PBL, PjBL, dan CTL

Dalam standar kompetensi lulusan, peningkatan diperlukan pada pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah, berbasis projek, dan konteks. Sebagai bagian dari proses kebudayaan, pendidikan harus mampu mengintegrasikan pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan konatif secara terpadu.<sup>32</sup> Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, sangat utama bagi pendidik untuk mengaplikasikan metode pembelajaran yang sederhana, aktif, dan inovatif. Salah satu pendekatan efektif adalah pembelajaran berbasis proyek, yang membantu mewujudkan tujuan pendidikan.<sup>33</sup> Selain fokus pada pengembangan tiga ranah hasil belajar, pembelajaran juga perlu mengasah keterampilan berpikir kritis, kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi. Pendidik perlu menvariasikan pendekatan pembelajaran berbasis masalah yang menempatkan peserta didik sebagai pusat proses belajar.<sup>34</sup>

Proses pembelajaran hendaknya membangkitkan minat, ketertarikan, perhatian dan keterlibatan peserta didik.<sup>35</sup> Selain dua pendekatan di atas, guru hendaknya terampil dalam

<sup>29</sup> Kusriyanto Kusriyanto dan Nur Wening, "Implementation of TQM in Islamic-Based Schools: A Literature Review," *Maneggio* 1, no. 3 (29 Juni 2024): 116–25, <https://doi.org/10.62872/wwm72195>.

<sup>30</sup> Indra Gunawan dkk., "Penerapan Total Quality Management Pada Dunia Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan," *Journal on Education* 6, no. 4 (27 Juni 2024): 22381–86, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6405>.

<sup>31</sup> Junaidi Ana dkk., "Pengendalian, Prinsip TQM, Dan Unsur Dalam Pengelolaan Mutu Sekolah," *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 3 (27 September 2024): 501–9, <https://doi.org/10.36312/jml.v5i3.3601>.

<sup>32</sup> Zubaedi, *Strategi Taktis Pendidikan Karakter* (Depok: Rajawali Press, 2017). h. 105.

<sup>33</sup> Putri Sekar Sari dan Maemonah Maemonah, "Analysis of Project-Based Learning in IPAS Subjects at Madrasah Ibtidaiyah: A Progressivism Perspective," *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 14, no. 2 (31 Agustus 2024): 106–20, <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v14i2.13215>.

<sup>34</sup> Alifia Khairullina dan Andi Prastowo, "Implementation of ICT-Based Problem-Based Learning Model to Improve Higher Order Thinking Skills in IPAS Learning in Madrasah Ibtidaiyah," *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 14, no. 2 (1 Oktober 2024): 151–61, <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v14i2.13282>.

<sup>35</sup> Tiara Noor Amalia dan Khairunnisa Khairunnisa, "PERBANDINGAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN STRATEGI COURSE REVIEW HORAY DENGAN STRATEGI TIC TAC TOE," *DARRIS:*

menerapkan CTL. Pembelajaran kontekstual mempermudah terkoneksi materi dengan situasi nyata, menstimulus anak didik agar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan penerapannya di kehidupan keluarga maupun masyarakat, supaya pembelajaran lebih berarti.<sup>36</sup> Misal, saat mengajarkan konsep kebutuhan manusia, guru dapat meminta siswa berbagi cerita tentang cara mereka dan keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Guru juga bisa mendorong siswa berpikir kritis dengan menyampaikan cerita atau menunjukkan gambar seorang tunawisma yang mencari makanan di tempat sampah.

## 2) Dana

Dana adalah elemen utama yang sangat dibutuhkan oleh setiap madrasah dalam proses pelaksanaan akreditasi. Kekurangan dana dapat menjadi kendala yang signifikan dalam keberhasilan akreditasi madrasah. Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua madrasah menyatakan kebutuhan yang tinggi akan dana. Dengan tersedianya dana, madrasah dapat melengkapi, memperbaiki, dan menyediakan berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi untuk memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan.

Keterbatasan sarana di madrasah sering kali disebabkan oleh anggaran pemerintah daerah yang tidak memadai, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan memelihara infrastruktur yang diperlukan.<sup>37</sup> Kurangnya sumber daya keuangan ini juga berimbas pada terbatasnya jumlah tenaga pengajar dan materi pendidikan, yang semakin memperburuk tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga-lembaga tersebut.<sup>38</sup> Manajemen keuangan yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan pengadaan fasilitas pendidikan. Pengalokasian dana sebaiknya ditentukan melalui rapat kerja tahunan dengan menetapkan rencana penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharannya secara terencana dan terstruktur.<sup>39</sup>

## 3) Sarana dan Prasarana

Selain dana, sarana dan prasarana juga merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap madrasah. Sarana dan prasarana menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan madrasah dalam proses akreditasi, karena di antara syarat utama akreditasi ialah skor standar sarana dan prasarana minimal mencapai 61. Oleh karena itu, madrasah perlu berupaya memenuhi standar kualitas sarana dan prasarana agar tercapai kualifikasi yang layak

---

*Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 2 (18 Oktober 2023): 93-113, <https://doi.org/10.47732/darris.v6i2.516>.

<sup>36</sup> Hasnawati, "Pendekatan Contextual Teaching Learning Hubungannya dengan Evaluasi Pembelajaran," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 3, no. 1 (2006), <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.635>; I. Ketut Surata, "PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) BERBASIS LKS UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BIOLOGI," *Bioedusiana: Jurnal Pendidikan Biologi* 4, no. 2 (27 November 2019): 114-20, <https://doi.org/10.34289/292826>.

<sup>37</sup> Khoirul Huda, "PROBLEMATIKA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Dinamika Penelitian* 16, no. 2 (2 Desember 2016): 309-36, <https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336>.

<sup>38</sup> Edi Martani, "Improving the Quality of Madrasah Education through Madrasah Resource Management," *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD* 3, no. 1 (27 Februari 2023): 25-38, <https://doi.org/10.35878/guru.v3i1.481>.

<sup>39</sup> Senang Senang, Erik Rikza Aulia, dan Sunardi Sunardi, "Manajemen Keuangan Madrasah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan," *At Tadbir: Islamic Education Management Journal* 2, no. 2 (21 Oktober 2024), <https://doi.org/10.54437/attadbir.v2i2.1766>.

untuk visitasi dan akreditasi. Selain itu, madrasah perlu memaksimalkan nilai akreditasi dengan melengkapi sarana dan prasarana.

Ketiadaan ruang laboratorium dan perpustakaan di madrasah menunjukkan kurangnya perhatian terhadap standar pembelajaran berbasis literasi, yang seharusnya menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai sumber daya untuk mendukung pembelajaran,<sup>40</sup> sementara Gerakan Literasi Madrasah menekankan pentingnya fasilitas ini untuk menumbuhkan minat baca di kalangan siswa.<sup>41,42</sup> Selain itu, ruang laboratorium juga vital untuk pembelajaran praktis, membantu siswa mengaplikasikan teori dalam praktik langsung,<sup>43</sup> sehingga tanpa fasilitas tersebut, integrasi literasi dalam kurikulum madrasah menjadi terhambat.<sup>44</sup>

Pemenuhan sarana dan prasarana membutuhkan perencanaan matang dan anggaran yang cukup, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Manajemen sarana dan infrastruktur sangat penting di sekolah,<sup>45</sup> dan administrasi yang baik memastikan fasilitas berfungsi dengan baik.<sup>46</sup> Penting untuk memeriksa data Dapodik/EMIS agar sesuai dengan lingkungan nyata. Jika terdapat ketidaksesuaian, admin Dapodik/EMIS harus segera memperbaruinya. Kelengkapan dan keselarasan data sarana dan prasarana pada Dapodik/EMIS merupakan kewenangan kepala sekolah yang didukung oleh wakil kepala sekolah yang membawahi hal-hal terkait sarana dan prasarana. Kepala sekolah dan wakilnya bertanggung jawab atas kelengkapan data.<sup>47</sup> Pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif akan memastikan keakuratan data, didukung oleh tenaga kependidikan dan masyarakat untuk menjaga kelangsungan fasilitas pendidikan.<sup>48</sup>

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menyeluruh merupakan salah satu elemen utama yang dinilai tim asesor untuk menentukan kelayakan sekolah dalam menyelenggarakan

<sup>40</sup> Mohammad Mansyur dan Abadi Abadi, "Perpustakaan Madrasah Sebagai Pusat Informasi Dan Sumber Belajar Bagi Siswa," *IJAL (Indonesian Journal of Academic Librarianship)* 4, no. 1 (30 Oktober 2020): 59–64.

<sup>41</sup> Madkan Madkan, M. Ali Haidar, dan Lusya Mumtahana, "Gerakan Literasi Madrasah Sebagai Upaya Menumbuhkan Minat Baca Siswa Madrasah Tsanawiyah," *Academicus: Journal of Teaching and Learning* 1, no. 1 (2022): 54–62, <https://doi.org/10.59373/academicus.v1i1.7>.

<sup>42</sup> Tri Wibowo dan Maswah Syifana, "Strategy and Portrait of the Literacy Movement in Public Madrasah Ibtidaiyah," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 6, no. 2 (31 Desember 2023): 263–78, <https://doi.org/10.33367/ijies.v6i2.4314>.

<sup>43</sup> Lulu' Anwariyah dkk., "How to Enhance Islamic Education Learning Outcomes through an Integrated Literacy Approach in Madrasah? A Case Study," *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (1 September 2024): 286–301, <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.242>.

<sup>44</sup> Novebri Novebri dan Hottua Samosir, "Enhancement of Madrasah Students' Literacy through AKMI Program Integrated in Educational Curriculum," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 16, no. 1 (28 Mei 2024): 373–82, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.4836>.

<sup>45</sup> Wiwin Septiana, Bukman Lian, dan Nuril Furkan, "Management of Infrastructure in Supporting the Implementation of the Merdeka Curriculum," *Journal of Social Work and Science Education* 5, no. 3 (11 November 2024): 1108–20, <https://doi.org/10.52690/jswse.v5i3.899>.

<sup>46</sup> Meti Fatimah dan Haerullah Haerullah, "Peran Administrasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam," *TSAQOFAH* 4, no. 6 (18 November 2024): 4109–20, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.4133>.

<sup>47</sup> Khoirul Amri dkk., "Startegi Pengembangan Mutu dan Akreditasi di Madrasah dalam Menghadapi Revolusi 5.0," *Jurnal Sustainable* 5, no. 2 (2022): 172–82, <https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2509>.

<sup>48</sup> Erlina Devayani, Bahrin Bahrin, dan Khairuddin Khairuddin, "The Influence Of Facilities And Infrastructure Management On The Effectiveness Of The Teaching And Learning Process At Superior High School Aceh Besar," *JETL (Journal of Education, Teaching and Learning)* 9, no. 2 (2 Oktober 2024): 96–102, <https://doi.org/10.26737/jetl.v9i2.5412>.

pendidikan Semakin lengkap dan berkualitas sarana serta prasarana yang dimiliki madrasah, semakin tinggi pula nilai yang akan diperolehnya. Sebaliknya, jika sarana dan prasarana terbatas, nilai yang diperoleh madrasah cenderung lebih rendah.

#### 4) Tenaga/Tim Akreditasi

Dalam menghadapi pelaksanaan akreditasi, pihak madrasah perlu mempersiapkan bukti fisik yang berkaitan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan guna memastikan kelancaran proses visitasi oleh tim asesor. Salah satu langkah penting adalah pembentukan tim khusus akreditasi yang mengikutsertakan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Penyusunan tim harus dilakukan secara teliti, dengan mempertimbangkan kemampuan guru dan staf yang akan bertanggung jawab untuk memperoleh dan mengkaji dokumen perangkat akreditasi.

Tenaga akreditasi yang handal dan profesional merupakan kebutuhan dan kewajiban yang harus ada bagi masing-masing madrasah dalam melaksanakan akreditasi. Dengan adanya tenaga/tim khusus akreditasi dapat mempermudah dalam mengelola dan menyediakan apa saja yang diperlukan dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan sesuai tugasnya masing-masing. Kerja sama yang efektif antar anggota tim menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya, yang menjadi kunci dalam memenuhi persyaratan akreditasi.<sup>49</sup>

#### 5) Tenaga Pendidik dan kependidikan

Tenaga pendidik adalah profesional yang berwenang untuk menyusun rencana, menjalankan, menilai pembelajaran, serta memberikan bimbingan, pelatihan, dan bakti sosial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sementara itu, tenaga kependidikan mendukung pendidikan melalui tugas administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis.<sup>50</sup> Tenaga kependidikan mencakup berbagai peran, seperti kepala madrasah, pengawas pendidikan, staf administrasi, pustakawan, petugas laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, serta petugas pemelihara kebersihan.

Kepala sekolah MI Darul Istiqomah menunjukkan bahwa tenaga pendidik merupakan kebutuhan penting bagi madrasah yang dikelolanya. Yang dimaksud dengan tenaga pendidik di sini adalah tenaga pendidik yang sudah berstatus Pegawai Negeri dan memiliki jurusan yang sesuai dengan harapan. Prastowo menyatakan bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan masalah yang paling rumit dan kompleks dalam pengembangan mutu di sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Dilihat dari segi kuantitas, jumlah sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah paling banyak dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Namun, tenaga administrasi masih sangat terbatas, dan mayoritas belum memiliki gelar S-1. Kelayakan mengajar guru dari segi kualifikasi pendidikan baru mencapai 81,05% dari total guru sekolah dasar di

---

<sup>49</sup> Aprillia Batu Bara, "Efektivitas Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di MAS PAB 1 Sampali," *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 2, no. 4 (10 Agustus 2024): 275–81, <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i4.2281>.

<sup>50</sup> Undang-undang nomor 23 Tahu 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Online. Tersedia di <http://pendis.kemendiknas.go.id/file/dokumen/uuno20th2003ttgsisdiknas.pdf> diakses 10 November 2018

Indonesia, dan jika dilihat dari kompetensi mengajar yang belum teridentifikasi dengan baik, masih banyak guru yang mungkin belum memenuhi syarat untuk mengajar di Indonesia.<sup>51</sup>

Madrasah masih kekurangan tenaga administrasi dan pustakawan sesuai standar. Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008, kepala administrasi diangkat jika madrasah memiliki lebih dari enam rombongan belajar, berpendidikan minimal SMK setara dengan pengalaman empat tahun. Tenaga administrasi lainnya minimum lulusan SMA/ sederajat dan diangkat jika tenaga kependidikan mencapai 50 orang.<sup>52</sup> Menurut Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008, kepala perpustakaan harus berijazah D4/S1 dengan sertifikat kompetensi dan pengalaman tiga tahun, atau D2 dengan sertifikat dan pengalaman empat tahun. Perpustakaan wajib memiliki tenaga lulusan SMA/ sederajat bersertifikat.<sup>53</sup>

Terkait kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, pengelola pendidikan di madrasah (Kanwil Kementerian Agama Kota dan Provinsi) hendaknya memberikan pembinaan non-teknis dan teknis kepada sekolah dengan mempertimbangkan status akreditasinya. Pengembangan profesional berkelanjutan bagi para pendidik sangatlah penting. Program pelatihan harus diselaraskan dengan standar dan praktik pendidikan terbaru untuk meningkatkan kualitas pengajaran.<sup>54</sup> Pembinaan non-teknis dapat berupa pemberian dana, fasilitas, dan infrastruktur, sementara pembinaan teknis dilakukan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Guru yang dipilih untuk pelatihan biasanya adalah mereka yang dinilai memiliki kemampuan akademis unggul demi menjaga reputasi pendidikan di daerah tersebut.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Banjarmasin Timur secara umum memiliki kesiapan yang tinggi dalam melaksanakan akreditasi, dengan rata-rata kesiapan sebesar 86,96%. Standar pembiayaan dan standar penilaian menunjukkan tingkat kesiapan tertinggi. Keterbatasan sarana dan prasarana di madrasah ibtidaiyah di Banjarmasin mencerminkan tantangan struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor, termasuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal. Kesesuaian latar belakang pendidikan guru dan penerapan model pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan kontekstual masih perlu ditingkatkan.

Kementerian Agama dan pihak terkait perlu mendukung pengadaan fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang keterampilan untuk meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana madrasah. Pelatihan berbasis kompetensi bagi guru baik secara luring maupun daring

<sup>51</sup> Andi Prastowo, "Penilaian Autentik dan Tantangan Mutu Pendidikan Abad XXI pada Jenjang Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia," dalam *Prosiding Seminar Nasional PD-PGMI* (Aceh: Ar-Raniry Press, 2017).

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, Online. Tersedia di [http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen\\_24\\_Th-2008.pdf](http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_24_Th-2008.pdf) diakses 11 November 2018.

<sup>53</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Online. Tersedia di [http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen\\_25\\_Th-2008.pdf](http://bsnp-indonesia.org/id/wp-content/uploads/tenaga/Permen_25_Th-2008.pdf) diakses 11 November 2018.

<sup>54</sup> Alvina Rizqy Octivani, Budhy Prianto, dan Roos Widjajani, "Standards of Education Management in the Quality of Tsanawiyah Madrasah," *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)*, ISSN:2454-8006, DOI: 10.31695/IJASRE 10, no. 8 (10 Agustus 2024): 27 to 36, <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2024.8.4>.

juga harus diprioritaskan, terutama dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah (PBL), proyek (PjBL), dan kontekstual (CTL) guna meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi siswa.

Madrasah perlu membentuk unit penggalangan dana mandiri yang dapat bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah. Selain itu, penyelesaian dokumen pembinaan kesiswaan, pengelolaan pegawai, dan sarana harus menjadi prioritas untuk memperkuat standar pengelolaan dan akreditasi. Penyediaan dana akreditasi yang memadai, baik dari APBN maupun sumber lain, harus menjadi prioritas utama guna mengatasi kendala dalam memenuhi persyaratan akreditasi. Langkah strategis lainnya adalah membentuk tim akreditasi yang kompeten dan terorganisasi untuk memudahkan pengelolaan dokumen serta bukti fisik selama proses akreditasi berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afridoni, Afridoni, Suntama Putra, Salfen Hasri, dan Sohiron Sohiron. "Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (3 Juli 2022): 13832–38. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4402>.
- Amalia, Tiara Noor, dan Khairunnisa Khairunnisa. "PERBANDINGAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN STRATEGI COURSE REVIEW HORAY DENGAN STRATEGI TIC TAC TOE." *DARRIS: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 2 (18 Oktober 2023): 93–113. <https://doi.org/10.47732/darris.v6i2.516>.
- Amri, Khoirul, Safiyah Riyantini, Salfen Hasri, dan Sohiron Sohiron. "Startegi Pengembangan Mutu dan Akreditasi di Madrasah dalam Menghadapi Revolusi 5.0." *Jurnal Sustainable* 5, no. 2 (2022): 172–82. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i2.2509>.
- Ana, Junaidi, Nurul Adha, Nurul Fajri Arifin, dan Nur Afif. "Pengendalian, Prinsip TQM, Dan Unsur Dalam Pengelolaan Mutu Sekolah." *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 3 (27 September 2024): 501–9. <https://doi.org/10.36312/jml.v5i3.3601>.
- Antonius. "Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar Negeri." *Fokus* 12, no. 2 (2014): 250–58.
- Anwariyah, Lulu', Ahmad Azis Fanani, Fathi Hidayah, dan Hasan Baharun. "How to Enhance Islamic Education Learning Outcomes through an Integrated Literacy Approach in Madrasah? A Case Study." *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (1 September 2024): 286–301. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i2.242>.
- Astenia, Dewi, Neti Karnati, dan Rugaiyah. *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH ATAU MADRASAH*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Bara, Aprillia Batu. "Efektivitas Pengawasan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di MAS PAB 1 Sampali." *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)* 2, no. 4 (10 Agustus 2024): 275–81. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i4.2281>.
- Basthomi, Yazid Al, Asep Sunandar, dan Agus Timan. "PENGELOLAAN PERSIAPAN AKREDITASI SEKOLAH DI MADRASAH ALIYAH." *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (4 Juni 2024): 393–402. <https://doi.org/10.26418/jvip.v16i2.73277>.

- Cyprian, Dlamini, Pinias Chikuvadze, Mudavanhu Young, Dziva Daimond, and Makuwire Claretah. "Competence-Based Education Pedagogy and Its Infusion into Primary School Learning Activities: Experiences from Teachers in A Selected Cluster in Eswatini." *Journal of Educational Research and Practice* 3, no. 1 (January 9, 2025): 1-15. <https://doi.org/10.70376/jerp.v3i1.267>.
- Devayani, Erlina, Bahrun Bahrun, dan Khairuddin Khairuddin. "The Influence Of Facilities And Infrastructure Management On The Effectiveness Of The Teaching And Learning Process At Superior High School Aceh Besar." *JETL (Journal of Education, Teaching and Learning)* 9, no. 2 (2 Oktober 2024): 96-102. <https://doi.org/10.26737/jetl.v9i2.5412>.
- Fatimah, Meti, dan Haerullah Haerullah. "Peran Administrasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam." *TSAQOFAH* 4, no. 6 (18 November 2024): 4109-20. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.4133>.
- Gunawan, Indra, Maman Hariana, Omanudin Omanudin, dan Tri Ngudi Wiyatno. "Penerapan Total Quality Management Pada Dunia Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan." *Journal on Education* 6, no. 4 (27 Juni 2024): 22381-86. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6405>.
- Hakim, Arif Rahman, dan Nugraha Suharto. "The Role of Accreditation in Improving Education Quality." *Atlantis Press* 258 (2018). <http://dx.doi.org/10.2991/icream-18.2019.61>.
- Hanun, Farida. "Akreditasi Madrasah sebagai Kunci Keberhasilan dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 13, no. 1 (2015).
- Harahap, Lia, Ibnu Hajar, dan Arif Rahman. "Analysis of Implementation of Standards for Facilities and Infrastructure of State Aliyah Madrasah in Medan City Based Minister of National Education Regulation Number of 2007." Dalam *Proceedings of the Proceedings of the the 3rd Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education, ACEIVE 2019, 16 November 2019, Universitas Negeri Medan, North Sumatra, Indonesia*. Medan, Indonesia: EAI, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.16-11-2019.2293262>.
- Hasnawati, -. "Pendekatan Contextual Teaching Learning Hubungannya dengan Evaluasi Pembelajaran." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 3, no. 1 (2006). <https://doi.org/10.21831/jep.v3i1.635>.
- Helda, Helda, dan Syahrani Syahrani. "National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia." *Indonesian Journal of Education (INJOE)* 3, no. 2 (1 Maret 2022): 257-69. <https://doi.org/10.54443/injoe.v3i2.32>.
- Huda, Khoirul. "PROBLEMATIKA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Dinamika Penelitian* 16, no. 2 (2 Desember 2016): 309-36. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336>.
- Imron, Ali. *Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah*. Malang: Jurusan AP FIP Universitas Negeri Malang, 2012.
- Khairullina, Alifia, dan Andi Prastowo. "Implementation of ICT-Based Problem-Based Learning Model to Improve Higher Order Thinking Skills in IPAS Learning in Madrasah Ibtidaiyah."

- Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 14, no. 2 (1 Oktober 2024): 151–61. <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v14i2.13282>.
- Kumar, Pradeep, Balvinder Shukla, dan Don Passey. “Impact of Accreditation on Quality and Excellence of Higher Education Institutions.” *Investigacion Operacional* 41 (Maret 2021): 151–67.
- Kurniadin, D. dan Machali. *Manajemen Pendidikan: Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012.
- Kusriyanto, Kusriyanto, dan Nur Wening. “Implementation of TQM in Islamic-Based Schools: A Literature Review.” *Maneggio* 1, no. 3 (29 Juni 2024): 116–25. <https://doi.org/10.62872/wwm72195>.
- M, Novidayanti, Rosbianti Rosbianti, Muhammad Amin Nur, dan Muh Hambali. “Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar.” *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 6, no. 4 (8 Juli 2024): 3260–65. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6964>.
- Madkan, Madkan, M. Ali Haidar, dan Lusia Mumtahana. “Gerakan Literasi Madrasah Sebagai Upaya Menumbuhkan Minat Baca Siswa Madrasah Tsanawiyah.” *Academicus: Journal of Teaching and Learning* 1, no. 1 (2022): 54–62. <https://doi.org/10.59373/academicus.v1i1.7>.
- Majid, Lukman Abdul. “Manajemen Pendidikan Pesantren Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Santri Di Pondok Pesantren Darus Sa’adah Lampung Tengah.” *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (19 Desember 2023): 44–54. <https://doi.org/10.58577/dimar.v5i1.103>.
- Mansyur, Mohammad, dan Abadi Abadi. “Perpustakaan Madrasah Sebagai Pusat Informasi Dan Sumber Belajar Bagi Siswa.” *IJAL (Indonesian Journal of Academic Librarianship)* 4, no. 1 (30 Oktober 2020): 59–64.
- Martani, Edi. “Improving the Quality of Madrasah Education through Madrasah Resource Management.” *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD* 3, no. 1 (27 Februari 2023): 25–38. <https://doi.org/10.35878/guru.v3i1.481>.
- Mubarok, Ramdanil, Makherus Sholeh, dan Ika Irayana. “Classroom Management Strategy in Implementing the Merdeka Curriculum (Independent Curriculum) in Primary Education Institutions.” *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 13, no. 2 (31 Desember 2023): 189–202. <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v13i2.11356>.
- Muslihah, Eneng, E. Syarifudin, Budiarmo, Nurlelah, dan Purnomo Mulyosaputro. “AKREDITASI SEBAGAI UPAYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH (PENELITIAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG).” *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 1 (3 September 2024): 132–50. <https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15486>.
- Muslihatuzzahro, Finy. “INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) IN THE CONTEXT OF EDUCATION.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah* 8, no. 02 (26 Juli 2023): 50–56. <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v8i02.260>.
- Novebri, Novebri, dan Hottua Samosir. “Enhancement of Madrasah Students’ Literacy through AKMI Program Integrated in Educational Curriculum.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan*,

- Sosial, Dan Agama* 16, no. 1 (28 Mei 2024): 373–82. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i1.4836>.
- Octivani, Alvina Rizqy, Budhy Prianto, dan Roos Widjajani. “Standards of Education Management in the Quality of Tsanawiyah Madrasah.” *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)*, ISSN:2454-8006, DOI: 10.31695/IJASRE 10, no. 8 (10 Agustus 2024): 27 to 36. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2024.8.4>.
- Prastowo, Andi. “Penilaian Autentik dan Tantangan Mutu Pendidikan Abad XXI pada Jenjang Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional PD-PGMI*. Aceh: Ar-Raniry Press, 2017.
- Sari, Putri Sekar, dan Maemonah Maemonah. “Analysis of Project-Based Learning in IPAS Subjects at Madrasah Ibtidaiyah: A Progressivism Perspective.” *Al-Adzka: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 14, no. 2 (31 Agustus 2024): 106–20. <https://doi.org/10.18592/aladzkapgmi.v14i2.13215>.
- Senang, Senang, Erik Rikza Aulia, dan Sunardi Sunardi. “Manajemen Keuangan Madrasah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.” *At Tadbir: Islamic Education Management Journal* 2, no. 2 (21 Oktober 2024). <https://doi.org/10.54437/attadbir.v2i2.1766>.
- Septiana, Wiwin, Bukman Lian, dan Nuril Furkan. “Management of Infrastructure in Supporting the Implementation of the Merdeka Curriculum.” *Journal of Social Work and Science Education* 5, no. 3 (11 November 2024): 1108–20. <https://doi.org/10.52690/jswse.v5i3.899>.
- Setianingsih, Charisma Dewi. “Status Akreditasi Dan Kualitas Sekolah di Sekolah Dasar Negeri.” *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan Universitas Negeri Malang* 1 (2017): 138.
- Siahaan, Tumpal, Paningkat Siburian, dan Din Sihotang. “School Accreditation In Disruption Era In Improving Quality Of Education (Case Study in Junior High School at Pematangsiantar).” Dalam *Proceedings of the Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia*. Medan, Indonesia: EAI, 2020. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2019.2296613>.
- Suharsono, Fajar Purwaningsih, dan Wildan Sirojuddin. “Akreditasi Sekolah Atau Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam.” *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 14, no. 1 (1 Juli 2024): 22–37. <https://doi.org/10.69879/xjf81h91>.
- . “Akreditasi Sekolah Atau Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam.” *Educatia : Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 14, no. 1 (1 Juli 2024): 22–37. <https://doi.org/10.69879/xjf81h91>.
- Sumaryanti, Sumaryanti, dan Nurtanio Agus Purwanto. “Achieving the Quality of Education through the Application of Eight National Education Standards Using School-Based Management.” *ALISHLAH: Jurnal Pendidikan* 15, no. 1 (9 Januari 2023): 135–46. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i1.1652>.
- Surata, I. Ketut. “PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) BERBASIS LKS UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BIOLOGI.” *Bioedusiana: Jurnal Pendidikan Biologi* 4, no. 2 (27 November 2019): 114–20. <https://doi.org/10.34289/292826>.

- Suryana, Asep. "Akreditasi, Sertifikasi Dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan," t.t. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_ADMINISTRASI\\_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP\\_SURYANA/AKREDITASI\\_dan\\_SERTIFIKASI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/AKREDITASI_dan_SERTIFIKASI.pdf).
- Ulum, Miftahul. "Kebijakan Standar Nasional Pendidikan." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, no. 1 (28 Maret 2020): 105-16. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>.
- Wibowo, Tri, dan Maswah Syifana. "Strategy and Portrait of the Literacy Movement in Public Madrasah Ibtidaiyah." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 6, no. 2 (31 Desember 2023): 263-78. <https://doi.org/10.33367/ijies.v6i2.4314>.
- Zubaedi. *Strategi Taktis Pendidikan Karakter*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Zulkifli, M. "Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAPS/M) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal At'dib*, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/235744-kinerja-badan-akreditasi-provinsi-sekola-acc2ba22.pdf>.